

BAB II

KAJIA PUSTAKA

A. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

1. Pengertian dan konsep pemberdayaan ekonomi.

Istilah pembedayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.⁷

Shardlow melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial ; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,

⁷ Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA*, (Malang: 2009), 17.

ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁸

Pemberdayaan masyarakat secara luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun manusia atau masyarakat. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Selain itu sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu, masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik.⁹

Setiap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yaitu menunjuk pada tingkatan kemampuan orang, khususnya kepada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan atau kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Terdapat tiga pokok dalam

⁸ Edi Suharto, *Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), 58.

⁹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 57.

setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutkan sebagai tri bina yaitu: bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan.¹⁰

Dari kompleksitas pemberdayaan diatas, penulis mencoba menyinggung pemberdayaan dalam tatanan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi identik dengan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat dewasa ini. Pemecahannya adalah tanggung jawab masyarakat itu sendiri, yang selama ini selalu terpinggirkan.

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya, artinya upaya mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktur ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh.¹¹

Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.¹²

¹⁰Totok Mardikanto Dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 114-115.

¹¹Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS* (Jakarta: Pustaka Utama, 1999), h. 368-369.

¹²Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, dalam Naskah No. 20, Juni-Juli 2000, 3.

Pemberdayaan ekonomi juga merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi. Karena dengan adanya pemberdayaan ekonomi mampu membuat masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya, dalam pemberdayaan ekonomi akan memprioritaskan kepada sumberdaya manusia dan sumber daya alamnya.

Manurut konsepsi, ekonomi keluarga adalah yang dikembangkan dan diusahakan oleh suatu keluarga dengan upaya penumbuhan minat dan motivasi berwirausaha dengan tenaga terampil. Keseluruhan upaya itu dilakuakn melalui pendekatan kelompok dengan meberdayakan institusi masyarakat.

Ekonomi keluarga dalam perspektif islam adalah sekumpulan norma asasi yang berasal dari sumber-sumber hukum islam yang dapat membentuk perekonomian rumah tangga. Norma-norma itu ditunjukkan untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para anggota rumah tangga perekonomian ini bertujuan menciptakan keidupan sejahtera di dunia dan keberuntungan dengan mendapat ridho Allah SWT di akhirat.¹³

Budaya kerja islami bertumpu pada akhlakul karimah, untuk itu ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandaskan pasa suatu

¹³ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 49.

keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu ibadah berprestasi itu indah, ada semacam panggilan dari hatinya untuk terus menerus memperbaiki diri, mencari prestasi bukan petisi dan tampil sebagai bagian ummat terbaik.

Ciri-ciri etos kerja yang harus dimiliki oleh keluarga muslim dalam mengembangkan usaha agar mengangkat pendapatan ekonomi keluarga yaitu pandai menciptakn peluang waktu, memiliki komitmen yang tinggi (Aqidah, Aqad dan I'tiqad), berkeinginan untuk mandiri, memperkaya jaringan silaturahmi, berbuar jujur, berorientasi pada produktivitas, memiliki insting silaturahmi, memperhatikan kesehatan dan gizi, mereka kecanduan belajar dan harus mencari ilmu, memiliki semangat perubahan, kesiapan, dan mereka tipe orang yang bertanggung jawab.

Sehingga kesejahteraan menurut islam bukan hanya sekedar mendapatkan kesejahteraan jasmani atau ekonomi saja namun lebih kepada kesejahteraan rohani, karena bekerja itu ibadah prestasi itu indah.

Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan keluarga untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan keluarga untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketarampilan, yang harus dilakukan secara

multi aspek, baik dari aspek keluarga sendiri maupun aspek kebijakan.¹⁴

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga merupakan suatu proses agar keluarga mampu melakukan kegiatan ekonomi (berwirausah produktif) ini merupakan salah satu unsur kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memantapkan program keluarga berencana.

Konsep Pemberdayaan Ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, dan berdaya saing tinggi edalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala penegmebangan ekonomi rakyat adlaah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubhan struktural yang di maksud adalah perubahan dari

¹⁴ Onny S,Prijoo dan A.M.W Pranaka, mengenai pemberdayaan : *konsep, kebijakan dan implementasi*, (Jakarta : CSIS, 1996), 48.

ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.

- d. Pemeberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan prosuktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah pemberian peluang atau akses yang lebih besara kepada aset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar price taker, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru dan pemetaan sosial.
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses, pengembangan SDM, dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

2. Strategi dan Prinsip Pembedayaan Ekonomi

Dalam pemberdayaan ekonomi di wilayah perkotaan dan pedesaan, terdapat 4 strategi yaitu :

a. Strategi Pertumbuhan.

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan prosuktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan paertisipasi masyarakat.

b. Strategi Kesejahteraan.

Strategi kesejahteraan bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk melalui dan peningkatan program pembangunan sosial yang berkata besar dan nasional, seperti perbaikan pendidikan, kesehatan dan gizi, penanggulan urbanisasi, perbaikan pemukiman penduduk, dan pembangunan fasilitas transportasi.

c. Startegi Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat.

Strategi terpadu dan menyuluh utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisifasip aktif masyarakat, sasaran strategi ini adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah¹⁵

¹⁵ Rahardjo Adisasmita, *pembangunan dan pedesaan dan perkotaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 21-22.

Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya kesejahteraan rakyat, maka pilihan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat (keluarga) hendaknya dilaksanakan dalam beberapa langkah strategis berikut :

- a) Pemberian akses yang lebih besar kepada aset produksi yaitu sumber daya yang melimpah upaya penguatan modal usaha.
- b) Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat dengan membangun kebersamaan dan kesetiakawanan agar timbul rasa percaya diri dan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi.
- c) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang kuat dan tangguh.
- d) Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tenaga kerja yang terampil, menguasai keterampilan dan keahlian hidup, serta tenaga kerja mandiri dengan bekal keahlian wirausaha.

Pemerataan pembangunan antar daerah agar rakyat mudah mengakses bantuan modal usaha dan banyaknya pelatihan tenaga kerja, dengan demikian ini pemberdayaan ekonomi kerakyatan tidak lain adalah mensejahterakan masyarakat dalam dimensi lahir dan batin.¹⁶

¹⁶ Nanih Mahendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), 70-71.

Pemberdayaan ekonomi keluarga dilaksanakan dengan kegiatan usaha ekonomi berskala rumah tangga, keluarga akan dibina melalui pelatihan-pelatihan wirausaha dan diberikan kredit modal bergulir guna memulai usaha yang tujuannya agar usaha bisa berkembang, dengan meyakinkan masyarakat (keluarga) akan potensi wirausaha dapat meningkatkan taraf hidup namun harus direalisasikan.

3. Sasaran Pemberdayaan Ekonomi.

Ekonomi keluarga merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dan sangat mendesak untuk dapat dikembangkan, sasaran pengembangan ekonomi masyarakat (keluarga) sebagai berikut :

- a) Kelompok masyarakat yang sudah menyadari adanya permasalahan yang terjadi dilingkungannya (ekonomi dan sosial) dan menyadari potensi yang ada serta sudah melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah.
- b) Kelompok masyarakat yang sudah menyadari adanya permasalahan yang terjadi dilingkungannya, tapi belum menyadari adanya potensi life skill yang dimilikinya.
- c) Kelompok masyarakat yang belum menyadari adanya permasalahan dan juga tidak menyadari adanya potensi life skill yang dimilikinya.¹⁷

¹⁷ BKKBN Pusat, Pengembangan Masyarakat, BKKBN, (Jakarta, 1992), 3.

4. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi.

Dalam realisasinya pemberdayaan ekonomi yang digalangan oleh pemerintah dan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang ini sangatlah sulit diterima dan dijalankan oleh masyarakat, tentu ini tidak terlepas dari kendala yang dihadapi baik kendala yang berasal dari dalam ataupun luar masyarakat.

Permasalahan pemberdayaan masyarakat apabila ditinjau dari aspek ekonomi adalah sebagai berikut :

- a) Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha yang produktif.
- b) Kurangnya penciptaan akses masyarakat keinput sumber daya ekonomi berupa modal, sumber daya alam, lokasi berusaha, informasi pasar dan teknologi produksi.
- c) Lemahnya kemampuan masyarakat kecil untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya.¹⁸

Berdasarkan tahapan pemberdayaan tersebut maka penulis akan menggunakannya dalam analisis terhadap program UMKM Inovasi Jagung yang dijalankan oleh masyarakat Desa Ketupat.

Dari uraian diatas jelas bahwa pemberdayaan ekonomi pada dasarnya menyangkut lapisan masyarakat (Keluarga) yang paling

¹⁸ Mangku Purnomo, *pembaharuan desa mencari bentuk penataan produksi desa*, (Yogyakarta : Laper Pustaka Utama, 2004), 87.

bawah yang dinilai kurang mampu, sehingga perlu adanya bantuan dari pihak seperti bantuan ekonomi tersebut dapat terwujud, dengan demikian taraf hidup masyarakat akan lebih meningkat.

5. Konsep Pemberdayaan keluarga

Pemberdayaan keluarga selalu memposisikan keluarga sebagai aktor utama baik sejak perencanaan maupun sampai proses evaluasi. Secara sederhana masyarakat (keluarga) dapat dikatakan berdaya apabila mampu mengidentifikasi masalahnya dan mengatasinya secara mandiri. Mandiri yang dimaksud disini adalah bahwa keluarga memahami akan situasi tatanan hidup bersama yang diinginkan dan bekerja dengan sadar secara bersama-sama untuk mencapainya.¹⁹

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:²⁰

- a. Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang
- b. Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses-akses sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar.
- c. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan

¹⁹Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, Op.Cit., 32-33.

²⁰Moh. Ali Azi, Rr. Suhartini dan A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005), 70.

cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Konsep yang penting didalam pemberdayaan adalah bagaimana mendudukan masyarakat (Keluarga) pada posisi pelaku pembangunan yang aktif, bukan penerima pasif. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional, maupun bidang politik, ekonomi dan lain-lain.²¹

Dalam pemberdayaan masyarakat (keluarga) perlu adanya proses, melalui proses maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan tersebut, untuk mencapai keluarga yang mandiri perlu adanya tahapan tahapan dalam memberdayakan suatu keluarga yakni.²²

- a. Tahap penyadaran, tahap ini merupakan tahap persiapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada tahap ini fasilitator atau pemberdaya masyarakat mampu menciptakan kondisi yang baik dan memotivasi mereka untuk melakukan penyadaran dari kondisinya pada saat itu, dengan adanya

²¹ Ibid, h. 71

²² Elwamendri, Tahapan Pemberdayaan Masyarakat (On-Line) tersedia di: <https://elwamendri.wordpress.com/2017/03/12/tahapan-pemberdayaan-masyarakat/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2017

semangat tersebut diharapkan dapat menghantakan masyarakat sampai pada kesadaran, sehingga masyarakat semakin terbuka dengan sekitarnya dan merasa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas diri serta memperbaiki kondisi yang ada.

- b. Tahap pembinaan, pada tahap ini, adanya proses transformasi pengetahuan, kecakapan dan ketampilan dapat berlangsung baik. Dalam hal ini masyarakat akan belajar tentang pengetahuan dan kecakapan yang baru yang nantinya berkaitan dengan tuntutan kebutuhan yang ada, sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap kemandirian, dalam tahap ini pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola kegiatannya proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud selforganizing dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara

bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu bagaimana menjalankan kegiatannya secara mandiri.

6. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.

Ada beberapa tahapan dalam proses pemberdayaan yaitu sebagai berikut²³.

a. Seleksi lokasi/wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan akan tercapai seperti yang diharapkan.

b. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi, merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk penciptaan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan, proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

c. Proses pemberdayaan masyarakat

²³Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*, (Bandung : Alfabeta, Cv ,2017), h. 125-128

Hakikat pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama hal-hal berikut :

- 1) mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya kegiatan ini bermaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya.
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi :
 - a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah
 - b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik
 - c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah
 - d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
- 3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok : rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitas dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.
- 4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus

secara partisipatif (participatory monitoring and evaluation /PME) PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan baik prosesnya (pelaksanaanya) maupun hasil agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

d. Pemandirian masyarakat yang tradisional

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat secara perlahan akan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat .

Berdasarkan tahapan pemberdayaan tersebut maka penulis akan menggunakannya dalam analisis terhadap UMKM Inovasi Jagung Marning dalam memberdayakan ekonomi keluarga.

7. Tujuan Pemberdayaan keluarga.

Memberdayakan keluarga merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga dalam melepaskan diri

dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan keluarga untuk memperkuat kekuasaan keluarga, khususnya kelompok-kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi dari keluarga itu sendiri) dan kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Terdapat beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok keluarga yang lemah atau kurang berdaya diantaranya sebagai berikut:²⁴

- a. Kelompok lemah secara fisik, yaitu orang dengan kecacatan dan kemampuan khusus.
- b. Kelompok lemah secara psikologis, yaitu orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.
- c. Kelompok lemah secara finansial, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal, dan asset yang mampu menopang kehidupannya.
- d. Kelompok lemah secara struktural, yaitu orang yang mengalami diskriminasi dikarenakan status sosialnya, gender, etnis, orientasi seksual, maupun pilihan politik.

Tujuan utama pemberdayaan keluarga adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-

²⁴Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: *Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 110.

kegiatan swadaya.²⁵ Pemberdayaan keluarga bertujuan untuk melahirkan keluarga yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi keluarga dapat berkembang, karena setiap daerah memiliki potensi yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketergantungan.

8. Strategi Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan ekonomi harus dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kemampuan keluarga. Sehingga pada akhirnya pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas sosial masyarakat. keluarga akan memiliki kemandirian, kemampuan mobilisasi sosial dan akses sumberdaya ekonomi, serta partisipasi yang luas dalam proses pembangunan daerah.²⁶

Pemberdayaan ekonomi yang efektif dan efisien diperlukan strategi agar memperoleh hasil yang maksimal. Strategi pemberdayaan serta pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu upaya pengembangan masyarakat. Setidaknya ada dua strategi besar yang dapat diterapkan yaitu :²⁷

- a. Peningkatan akses ke dalam aset produksi (productive assets):
bagi masyarakat yang masih dominan dalam ekonomi rakyat,

²⁵Hamdani Fauzi, *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*, (Bandung : Karya Putra Darwati, 2012), 196.

²⁶Amran Saefullah, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Tasikmalaya*, (On-Line) Tersedia di: <http://www.kabar-priangan.com/news/detail/405>, 2011, Diakses pada Tanggal 01 Agustus 2021, pukul 01:00

²⁷Totok Madikanto dan Poerwoko Soebinto, *Op.Cit*, 173-174.

moda produktif yang utama adalah tanah. Disamping itu akses masyarakat kepada lingkungan hidup yang sehat yang tidak tercemar akan mengurangi beban dan menambah produktifitas masyarakat. Akses kedalam modal harus diartikan sebagai keterjangkauan, yang memiliki sisi pertama, ada pada saat diperlukan dan yang kedua, dalam jangkauan kemampuan untuk memanfaatkannya.

- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat sebagai produsen dan penjual, posisi kekuatan rakyat sangatlah lemah. Mereka adalah price taker karena jumlahnya yang sangat banyak dengan pasar masing-masing yang sangat kecil. Karenanya kualitas dan tingkat keterampilan rendah menjadi karakteristik pula dari ekonomi rakyat.

Gerakkan pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya kesejahteraan rakyat. Maka pilihan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat hendaknya dilaksanakan dalam beberapa langkah strategi berikut :²⁸

- a. Pemberian akses yang lebih besar kepada asset produksi yaitu sumber dana yang melimpah.
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat dengan dan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi.

²⁸ Nanih Mahendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 70-71.

- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang kuat dan tangguh.
- d. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tenaga kerja yang terampil, menguasai keterampilan dan keahlian hidup, serta tenaga kerja mandiri dengan bekal keahlian wirausaha.
- e. Pemerataan pembangunan antar daerah agar rakyat mudah mengakses bantuan modal usaha dan banyaknya pelatihan ketenagakerjaan. Dengan demikian, inti pemberdayaan ekonomi kerakyatan tidak lain adalah mensejahterakan masyarakat dalam dimensi lahir dan batin.

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam usaha pemberdayaan dibutuhkan faktor pendorong yang dapat mendorong terjadinya pemberdayaan. Faktor pendorong terjadinya pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam setiap program pemberdayaan ekonomi. Untuk itu, pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi.

²⁹ Mardi Yatmo Hutomo, *Op.Cit*, 8-11.

b. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan salah satu sumber daya pembangunan yang cukup penting dalam proses pemberdayaan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sumber daya alam ini telah dimanfaatkan sejak jaman dahulu dari masa kehidupan nomaden sampai zaman industrialisasi.

c. Permodalan

Permodalan merupakan salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya. Namun, ada hal yang perlu dicermati dalam aspek permodalan yaitu, bagaimana pemberian modal tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat serta dapat mendorong usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah supaya berkembang ke arah yang maju.

d. Prasarana Produksi dan Pemasaran

Pendorong produktifitas dan tumbuhnya usaha diperlukan prasarana produksi dan pemasaran. Jika hasil produksi tidak dipasarkan maka usaha akan sia-sia. Untuk itu, komponen penting lainnya dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah tersedianya prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran seperti alat transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan mengurangi

rantai pemasaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan masyarakat dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, maupun pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, tersedianya prasarana produksi dan pemasaran penting untuk membangun usaha ke arah yang lebih maju.

9. Indikator Keberhasilan Suatu Proses Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan ekonomi keluarga dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan dan fokus yang menjadi perhatian utamanya. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan ekonomi keluarga secara operasional, maka perlu diketahui indikator-indikator keberhasilannya. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan ekonomi keluarga dijalankan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.³⁰

Keberhasilan suatu pemberdayaan bukan hanya dilihat dari segi fisik maupun ekonomi, melainkan dari segi psikologis dan sosial seperti:³¹

- a. Memiliki sumber pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri serta keluarga, misalnya mampu membeli beras, minyak goreng, gas memasak, bumbu, shampo, sabun, dan lain sebagainya.

³⁰Edi Suharto, *Memberdayakan Masyarakat...*, Op.Cit, 62.

³¹Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial*, Op-Cit, 110-111.

- b. Mampu mengemukakan pendapat di dalam keluarga maupun masyarakat umum, misalnya mengemukakan pendapat terkait renovasi rumah, pembelian hewan ternak, dan lain sebagainya.
- c. Memiliki mobilitas yang cukup luas dengan pergi ke luar rumah atau luar wilayah tempat tinggalnya seperti di bioskop, pasar, fasilitas medis, rumah ibadah, dan lain sebagainya.
- d. Mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial, misal kampanye atau aksi-aksi sosial lainnya.
- e. Mampu membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan hidupnya.

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.³² Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.³³

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang

³²Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 16.

³³ *Ibid*, 17.

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.³⁴ Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.³⁵

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00, dan.

³⁴Ibid, 18.

³⁵Ibid, 19.

- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.³⁶

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

³⁶Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

Pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penerapan tenaga kerja. Disamping usaha mikro kecil dan menengah juga dapat menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap Product Domestic Bruto (PDB).

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

2. Klasifikasi Usaha Mikro

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap

berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB)³⁷

3. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu

³⁷Ade Resalawati, "Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia" (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 31.

dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di update sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar

sangat terbatas.

- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.³⁸

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.³⁹

4. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah :

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia;
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru;
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan

³⁸ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010), 32.

³⁹ *Ibid*, 33.

manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar;

- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya:
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor :

- 1. Faktor Internal Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya :

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha

Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.

- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.

- d. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
2. Faktor eksternal, merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan

keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.⁴⁰

C. Peran UMKM dalam Perekonomian

Ada tiga alasan negara untuk mendorong usaha kecil untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah bahwa usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang baik dalam hal yang menghasilkan tenaga kerjayang produktif. Kemudian alasan kedua, seringkali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk alasan ketiga, usaha kecil memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. Usaha mikro berperan penting dalam pembangunan perekonomian negara khususnya terhadap ekonomi masyarakatsekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan datang.

Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut peran usaha mikro menurut departemen koperasi.

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
2. Penyedia lapangan pekerjaan terbesar.
3. Pemain penting dalam kegiatan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi.

⁴⁰Op.Cit Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010), 67.

5. Kontribusinya terhadap negara pembayaran.⁴¹

Tidak dapat dipungkiri Usaha Mikro Kecil dan Menengah memegang peranan penting bagi negara untuk memajukan perekonomian suatu negara. demikian, indonesia sejak di terpa badai krisis finansial pada 1996 silam, masih banyak usaha kecil menengah saat ini masih mampu bertahan. Meskipun mereka goyang dari dampak yang ditimbulkan namun dengan semangat dan jiwa yang kuat maka mereka secara perlahan-lahan mampu bangkit dari keterpurukan dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Penerapan ekoinomi kerakyatan guna mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yaitu berupa dukungan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM), sehingga hasil produksi UMKM tidak hanya di pasarkan di pasar lokal tetapi di luar daerah dan semakin berkembang. Apalagi di dukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran produk tidak lagi dibatasi tempat dan waktu. Serta tidak hanya dari pemerintah saja perusahaan dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah dapat membuka jalan baru bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dari mulai usaha kecil sampai menengah. Munculnya partisipasi masyarakat munculnya usaha-usaha baru maupun mengembangkan usaha yang sudah ada serta memunculkan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan

⁴¹ Departemen Koperasi 2008 Tersedia di www.depkop.go.id. Situs Resmi Departemen.

peran UMKM tersebut dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan melibatkan kesejahteraan masyarakat.⁴²

Dapat dilihat bahwa UMKM sangat berperan sangat penting dalam sebuah kesejahteraan masyarakat, dimana UMKM merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat membantu pembangunan ekonomi, dengan kegiatan UMKM ini dapat membantu banyak kalangan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, dengan adanya UMKM juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat membantu ekonomi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dari teori diatas terdapat beberap langkah dalam membentuk ekonomi keluarga, tentu ini akan diterapkan dalam proses pemberdayaan ekonomi keluarga, dan akan dijadikan sebagai bahan analisis penulis.

⁴²Adnan Husadi Putra, “Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora”, Jurnal Analisis Sosiologi, VOL 5, No.2, (Desember 2011), 41.